

1. PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini dibuat, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Manusia telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya sejak jaman dahulu (Molnar, 2009). Kualitas hidup manusia sudah menjadi perbincangan sejak beribu-ribu tahun yang lalu saat para filsuf dan pemikir seperti Thomas Aquinas ataupun Confucius berdiskusi mengenai hal-hal apa yang menjadikan kehidupan individu dan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan Suh, dalam Kahneman, Diener, dan Schwarz, 1999). Pada era modern, sekitar awal tahun 1970, kualitas hidup sebagai konsep sasaran dan tujuan masyarakat (*societal goals and objectives*) mulai kembali diperbincangkan publik, kemudian sempat kehilangan perhatiannya akibat terdiferensiasinya definisi dan pendekatan kualitas hidup ke arah yang berbeda-beda (Glatzer dan Mohr, dalam Strack, Argyle, & Schwarz, 1991).

Saat ini, kualitas hidup sudah menjadi isu prioritas bagi banyak negara (Molnar, 2009) dan telah digunakan secara umum untuk menggambarkan kesejahteraan individual dalam suatu masyarakat (Chamberlain; Diener; Oppong dkk; Shuessler & Fisher, dalam Liao, Fu, & Yi, 2005). Kualitas hidup menjadi variabel perkembangan masyarakat yang terpenting dan dianggap sebagai faktor yang dapat menstimulasi perkembangan suatu masyarakat (Molnar, 2009). Secara awam, kualitas hidup berkaitan dengan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener & Suh, dalam Kahneman, Diener, dan Schwarz, 1999). Menurut Molnar (2009), dengan melihat kualitas hidup suatu masyarakat dapat diketahui posisi masyarakat tersebut dalam hubungannya dengan kondisi masyarakat yang diinginkan/ ideal. Negara-negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, memantau kualitas hidup masyarakatnya secara berkala. Hasil dari pengukuran kualitas hidup dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi suatu kebijaksanaan politik ataupun

perkembangan kesejahteraan masyarakatnya, atau bagi observer di luar negaranya untuk melihat dan mengevaluasi performa masyarakat tertentu, atau dapat juga digunakan oleh para pelajar atau peneliti untuk melihat hubungan antara berbagai aspek dalam masyarakat (Shackman, Liu, & Wang, 2005). Hal yang serupa berlaku juga untuk perkembangan kota. Molnar (2009) mengatakan bahwa kota dibangun untuk masyarakatnya sehingga kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan peningkatan kualitas hidup tersebut secara berkelanjutan adalah esensial dalam strategi pembangunan kota.

World Urban Forum (WUF) tahun 2006 di Kanada memprediksi bahwa pada tahun 2010, setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah pinggiran karena kota-kota utama tidak dapat mengikuti peningkatan jumlah penduduk yang pesat (Mass Rapid Transportation Jakarta, 2009). Akibatnya, kapasitas kota-kota utama untuk menampung penduduknya menjadi tidak memiliki kapasitas yang cukup sehingga menurunkan kualitas hidup penduduknya (Mass Rapid Transportation Jakarta, 2009). Menurunnya kapasitas kota besar untuk menyokong penduduknya ini sudah mulai terlihat di Jakarta sebagai kota terbesar sekaligus pusat ekonomi dan pemerintahan di negara Indonesia. Jakarta sejak tahun 1971 hingga tahun 1990 tercatat sebagai daerah di Indonesia yang paling banyak didatangi oleh imigran dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun (Emalisa, 2003). Salah satu dampak dari tingginya tingkat migrasi ini adalah bertambah padatnya penduduk kota Jakarta (Eca, 2009). Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada Juni 2007 jumlah penduduk Jakarta adalah sebanyak 7.552.444 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta di awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta telah mengalami peningkatan jumlah penduduk lebih dari 10 kali lipat (“Daerah Khusus”, 2009). Akibatnya, jumlah angkatan kerja di Jakarta bertambah (Eca, 2009), menyebabkan ketimpangan jumlah pencari kerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia sehingga pengangguran di Jakarta pun bertambah (AntaraNews, 2008). Dalam rentang satu tahun (2007-2008), jumlah penganggur di Jakarta meningkat sebanyak 28.130 orang menjadi 580.511 orang (Eca, 2009; Piatu, 2009). Semakin banyaknya jumlah pengangguran mengakibatkan banyaknya jumlah masyarakat yang jatuh pada kemiskinan. Asisten Kesejahteraan

Masyarakat pada Sekda Provinsi DKI Jakarta Rohana Manggala menambahkan bahwa saat ini terdapat 630.000 warga miskin di Jakarta, meningkat dari 560.000 pada tahun 2005. Dari sedikit gambaran mengenai kondisi Jakarta saat ini, sudah mulai terlihat bagaimana pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Jakarta dapat mengurangi kapasitas kota Jakarta untuk menyokong kehidupan penduduknya.

Berkurangnya kapasitas kota Jakarta ini terutama akan berdampak pada penduduk dewasa di Jakarta. Timpangnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah pekerjaan yang tersedia di Jakarta mengindikasikan tingginya kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Padahal, karir dan pekerjaan adalah salah satu tugas perkembangan dewasa (Levinson, dalam Papalia, Olds, dan Feldman, 2007; Papalia, Sterns, Feldman, dan Camp, 2007) dan memiliki peran yang penting dalam tugas perkembangan dewasa yang lainnya. Sulitnya mencari pekerjaan dapat menghambat individu dewasa di Jakarta untuk dapat menyelesaikan tugas perkembangannya. Selain karir dan pekerjaan, tugas perkembangan lain bagi individu dewasa adalah membentuk keluarga dan memelihara standar kehidupan keluarga yang layak (Havighurst, dalam Smolak, 1993; Erikson, 1950, 1968, dalam Eysenck, 2004). Untuk dapat membentuk keluarga dan mendapatkan standar kehidupan yang layak tentunya dibutuhkan kondisi ekonomi yang cukup sedangkan untuk mendapatkan ekonomi yang cukup dibutuhkan pekerjaan. Dampak dari tingginya kompetisi mencari pekerjaan di Jakarta menjadi hambatan bagi penduduk dewasa di Jakarta untuk dapat memenuhi berbagai tugas perkembangannya. Berdasarkan hal ini dapat dilihat dampak dari berkurangnya kapasitas kota Jakarta untuk menyokong penduduknya bagi penduduk dewasa di Jakarta. Karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada penduduk Jakarta yang berusia dewasa.

Berdasarkan WUF tahun 2006, berkurangnya kapasitas kota Jakarta ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk kota Jakarta. Padahal, peningkatan kualitas hidup adalah hal yang esensial bagi perkembangan kota (Molnar, 2009). Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kualitas hidup dapat menjadi faktor yang dapat menstimulasi perkembangan masyarakat (Molnar, 2009). Dengan mengetahui diskrepansi antara kondisi pada saat ini dengan kondisi yang diinginkan, masyarakat diharapkan dapat lebih terpacu untuk

meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itulah, kualitas hidup menjadi variabel perkembangan masyarakat yang terpenting (Molnar, 2009). Dalam menjadikan kualitas hidup sebagai salah satu kriteria penting dalam pembangunan kota, diperlukan pengawasan kualitas hidup masyarakat kota tersebut, pengukuran kualitas hidup yang tepat, serta adanya penghayatan subjektif dari masyarakatnya (Molnar, 2009).

Sebenarnya sudah terdapat lembaga internasional (Mercer) yang juga mengukur kualitas hidup di kota Jakarta dan membandingkannya dengan kota-kota lain baik di Indonesia sendiri maupun di dunia. Berdasarkan pengukuran ini, kualitas hidup di Jakarta masih tertinggal jauh dari beberapa kota lain di Asia Tenggara dan tidak mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya (The Jakarta Post, 2009). Sedangkan di antara kota-kota di Indonesia sendiri, Jakarta sebagai ibu kota yang seharusnya menjadi terdepan dalam perkembangan negaranya dilaporkan menempati urutan ketujuh dari 26 kota di Indonesia, di bawah Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, dan Palembang. (Kompas, 2009). Sayangnya, pengukuran ini dilakukan murni secara objektif tanpa adanya peran dari penduduk Jakarta sendiri yang dilihat kualitas hidupnya dan diukur menggunakan indikator-indikator yang terstandardisasi (stabilitas politik, angka kriminalitas, penegakan hukum, pelayanan bank, pembatasan kebebasan personal, pelayanan dan ketersediaan medis, penyakit menular, pengelolaan air kotor, ketersediaan sekolah sesuai standard, transportasi umum, lalu lintas, dan perumahan di Jakarta) (Kompas, 2009). Padahal, Molnar (2009) mengatakan bahwa penghayatan subjektif dari masyarakat adalah hal yang penting dalam menjadikan kualitas hidup sebagai kriteria perkembangan kota. Selain itu, pengukuran kualitas hidup secara objektif juga cenderung mengevaluasi kualitas hidup secara negatif (melihat apa yang kurang dari suatu aspek). Moons, Marquet, Budst, dan de Geest (2004) mengatakan bahwa pengukuran kualitas hidup sebaiknya memungkinkan evaluasi kualitas hidup baik secara negatif maupun positif.

Perbincangan mendasar mengenai kualitas hidup yang masih berlangsung sampai saat ini adalah perdebatan mengenai pengukuran kualitas hidup yang adekuat: apakah pengukuran kualitas hidup harus sepenuhnya objektif, ataukah

sebaiknya kualitas hidup diukur berdasarkan pengukuran yang bersifat subjektif (Glatzer & Mohr, dalam Strack, Argyle, dan Schwarz, 1991). Pengukuran kualitas hidup secara objektif pada umumnya menggunakan indikator-indikator yang sudah terstandarisasi dalam alat ukur dan berdasarkan pada data-data yang tidak diambil langsung dari individu terkait, misalnya data kemiskinan di suatu wilayah, angka kriminalitas, dan sebagainya. Sedangkan pada pengukuran kualitas hidup secara subjektif, penilaian mengenai kualitas hidup dilakukan secara subjektif oleh individu yang diukur kualitas hidupnya. Indikator kualitas hidup dalam pengukuran subjektif dapat berupa indikator yang terstandarisasi maupun subjektif ditentukan sendiri oleh individu terkait. Sehubungan dengan perdebatan pengukuran subjektif dan objektif dari kualitas hidup, kebanyakan ahli berpendapat bahwa lingkup dari konsep dan pengukuran kualitas hidup harus berpusat pada persepsi subjektif individual mengenai kualitas hidup dari kehidupannya sendiri (Mendlowicz & Murray, 2000). Salah satunya Carr dan Higginson (2001) mengatakan bahwa kualitas hidup merupakan konstruk individual dan hal ini sebaiknya menjadi pertimbangan dalam pengukuran kualitas hidup. Molnar (2009) juga telah mengatakan bahwa sehubungan dengan menggunakan kualitas hidup sebagai kriteria penting pembangunan masyarakat, diperlukan adanya penghayatan subjektif dari masyarakat mengenai kualitas hidup mereka disamping pengadaaan pengawasan berkala kualitas hidup dan pengukuran kualitas hidup yang tepat. Dengan kata lain, kualitas hidup sebaiknya dipertimbangkan untuk diukur secara subjektif dan individual.

Lebih lanjut lagi, Komardjaja dan Leisch (2000) mengatakan bahwa dalam ruang lingkup negara Indonesia, pengukuran kualitas hidup yang dilakukan secara objektif tidak disarankan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya sehingga pengukuran kualitas hidup berdasarkan indikator-indikator yang telah distandardisasi secara objektif menjadi tidak adil bagi masyarakat Indonesia (Komardjaja dan Leisch, 2000). Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Moons, Marquet, Budst, dan de Geest (2004) bahwa pengukuran kualitas hidup yang terstandarisasi menggunakan indikator-indikator mungkin tidak relevan terhadap individu yang diukur kualitas hidupnya karena mengabaikan

adanya variasi dari persepsi individu mengenai aspek-aspek yang dianggap penting bagi kehidupannya. Berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh Komardjaja dan Leisch tersebut, maka hasil pengukuran kualitas hidup masyarakat Jakarta yang dilakukan oleh Mercer dapat tidak relevan karena indikator-indikator yang digunakan belum tentu relevan dengan kondisi masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan usaha penelitian kualitas hidup penduduk Jakarta yang diukur secara subjektif.

Definisi kualitas hidup yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian subjektif individu mengenai posisi kehidupannya saat ini pada beberapa aspek kehidupan yang penting baginya. Berdasarkan definisi ini, dalam pengukuran kualitas hidup akan dibutuhkan aspek-aspek kehidupan yang relevan/penting terhadap individu dalam kaitannya dengan kualitas hidup dan penilaian subjektif dari individu mengenai posisi kehidupannya saat ini pada aspek-aspek kehidupan tersebut. Browne dkk (1997) mengatakan bahwa manusia mendefinisikan aspek-aspek kehidupan dengan cara yang berbeda-beda, menggunakan kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi aspek-aspek tersebut, dan memberikan penekanan derajat kepentingan yang berbeda pada aspek-aspek tersebut dalam kaitannya terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak penelitian kualitas hidup yang tidak mempertimbangkan hal ini membuat model kualitas hidup terstandarisasi dan menyeleksi aspek-aspek kehidupan yang akan dilihat dari responden, sehingga penelitian tersebut lebih mengukur status aspek kehidupan secara umum daripada mengukur kualitas hidup (Carr & Higginson, 2001). Berdasarkan hal ini, maka sebaiknya aspek-aspek kehidupan yang diukur dalam kualitas hidup sebaiknya ditentukan/ dinominasi sendiri oleh individu karena aspek kehidupan yang relevan bagi seseorang belum tentu relevan bagi orang lain. Selain itu, akan dibutuhkan juga penilaian subjektif dari individu sendiri mengenai seberapa pentingnya aspek kehidupan tersebut dalam pengaruhnya terhadap kualitas hidupnya.

The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life – Direct Weight (SEIQoL-DW) adalah alat ukur yang dikembangkan sesuai dengan pemikiran tersebut. Dalam SEIQoL-DW, individu menominasi sendiri aspek-aspek kehidupan yang dianggap relevan, memberikan penilaian subjektif

mengenai posisi kehidupannya saat ini pada tiap-tiap aspek yang telah dinominasi, dan memberikan bobot kepentingan (sejauh mana ia menganggap aspek kehidupan tersebut penting baginya dalam kaitannya dengan kualitas hidup) dari masing-masing aspek-aspek tersebut (Browne dkk, 1997). Dengan demikian, SEIQoL-DW sebagai alat ukur memungkinkan pengukuran kualitas hidup yang didasarkan pada perspektif individual itu sendiri (Hickey dkk, 1996) dan mampu memberi gambaran mengenai persepsi individu mengenai kualitas hidup dan aspek-aspek kehidupan yang mempengaruhinya. Selain itu, kualitas hidup yang dipersepsi sendiri oleh individu juga memungkinkan adanya evaluasi kualitas hidup baik secara positif maupun negatif tergantung dari individu masing-masing sebagai salah satu batasan pengukuran kualitas hidup yang dikemukakan oleh Moons, Marquet, Budst, dan de Geest (2004).

Penelitian ini adalah bagian dari payung penelitian “Kebahagiaan Kualitas Hidup Penduduk Jakarta”, sehingga tahap persiapan dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh peneliti bersama dengan rekan-rekan dalam penelitian payung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran mengenai kualitas hidup pada penduduk dewasa di Jakarta dengan menggunakan alat ukur SEIQoL-DW. Berdasarkan pengukuran dengan SEIQoL-DW yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian ini, yakni bagaimana gambaran kualitas hidup penduduk dewasa di Jakarta dan aspek-aspek kehidupan apa saja yang dianggap penting oleh penduduk dewasa di Jakarta dalam kaitannya dengan kualitas hidup.

1.2 Permasalahan Penelitian

1. Bagaimana gambaran kualitas hidup penduduk dewasa di Jakarta?
2. Aspek-aspek kehidupan apa saja yang dianggap penting oleh penduduk dewasa di Jakarta dalam kaitannya dengan kualitas hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh penduduk dewasa di Jakarta dalam kaitannya dengan

kualitas hidup dan melihat kualitas hidup penduduk dewasa di Jakarta berdasarkan aspek-aspek tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian psikologi positif khususnya pada pembahasan kualitas hidup masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan baik bagi masyarakat Jakarta maupun bagi pemerintah Jakarta mengenai gambaran kualitas hidup dan aspek-aspek kehidupan penting bagi penduduk Jakarta, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup kota Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bagian, sebagai berikut:

- Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dilakukannya penelitian, permasalahan, tujuan, dan penelitian, serta sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- Bab 2 mengulas teori-teori penunjang yang digunakan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, antara lain teori mengenai kualitas hidup, tahap perkembangan dewasa serta gambaran kondisi Jakarta saat ini.
- Bab 3 menguraikan variabel penelitian, penjelasan metode penelitian yang digunakan, responden penelitian, teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, dan prosedur pelaksanaan penelitian.
- Bab 4 memaparkan gambaran umum responden dan hasil penelitian berupa gambaran kualitas hidup penduduk dewasa di Jakarta dan aspek-aspek kehidupan yang berarti bagi penduduk dewasa di Jakarta serta hasil tambahan yang didapatkan dari penelitian ini.
- Bab 5 berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian, diskusi yang memuat penjelasan peneliti mengenai hasil yang didapatkan, keterbatasan penelitian, saran teoritis untuk pengembangan penelitian, serta saran praktis berdasarkan hasil penelitian.